

**ANALISIS SEKSYEN 54 ENAKMEN UNDANG-UNDANG
KELUARGA ISLAM NEGERI MELAKA TAHUN 2002
MENGENAI PENETAPAN ANGGAPAN MATI
SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH
DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**AMIERAH BINTI YA'AKOB
11521205578**

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL ASY-SYAKSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS SEKSYEN 54 ENAKMEN UNDANG-UNDANG
KELUARGA ISLAM NEGERI MELAKA TAHUN 2002
MENGENAI PENETAPAN ANGGAPAN MATI
SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH
DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**AMIERAH BINTI YA'AKOB
11521205578**

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL ASY-SYAKSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"ANALISIS SEKSYEN 54 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI MELAKA TAHUN 2002 MENGENAI PENETAPAN ANGGAPAN MATI SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM"*

yang ditulis oleh :

Nama : AMIERAH BINTI YA'AKOB

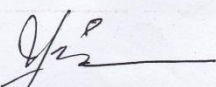
NIM : 11521205578

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syaksiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rajab 1440 H
Maret 2019 M

Pembimbing Skripsi


Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP : 19710101 199703 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisis Seksysyen 54 Enakmen Undang – Undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 Mengenai Anggapan Mati Sebagai Alasan Fasakh Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam*, yang ditulis oleh :

Nama : **AMIERAH BINTI YA'AKOB**
NIM : 11521205578
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 06 November 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

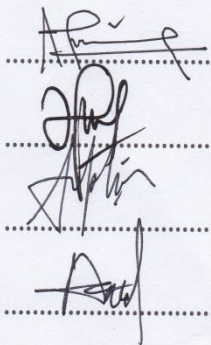
Pekanbaru, 06 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

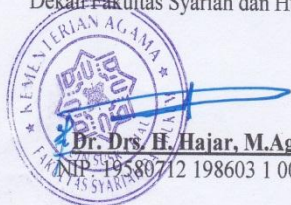
Sekretaris
Haswir, M.Ag

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Dr. Arisman, M.Sy



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSPIRASIKU

Demi sebuah harapan,
Demi menggapai impian,
Demi mencari cinta dan redhaNya...
Akan ku terus berlari walau dalam kesamaran.....
Ku di sini pada hari ini,
Hanya berbekalkan sebuah keyakinan yang menggunung....
Tidak akan rapuh,
Tidak akan runtuh,
Walaupun tenggelam di lautan duka....
Akan ku terus tersenyum,
Demi menutup secebis luka.....
Walau jalan itu dihiasi duri,
Akan tetap ku teruskan langkah,
Walau hancur luluh jiwaku,
Bara api itu tetap kan ku genggam,
Walau air mata menjadi teman setia,
Ku tetap kan sentiasa mengukir senyum walaupun payah,
Demi melihat sinar kebahagiaan,
Terpancar pada mata seorang ayah,
Melihat senyuman yang terukir pada bibir lesu seorang ibu,
Akan ku terus belayar walau dilambung ombak,
Karena ku yakin disuatu saat.....
Ku pasti kan berlabuh di pulau harapan,
Bersama terbitnya sang mentari senja,
Dihiasi indahna warna sang pelangi yang muncul setelah hujan...
Wahai pemilik cintaku,
Walau sedalam mana luka itu....
Sembuhkanlah ia,
Dengan cintaMu...
Cukuplah Allah bagiku.....

ABSTRAK

Amierah Binti Ya'akob: *Analisis Seksyen 54 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 Mengenai Penetapan Anggapan Mati Sebagai Alasan Fasakh Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam.*

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya penetapan anggapan mati sebagai alasan fasakh nikah dan tenggang waktu bagi orang yang hilang. Berdasarkan analisis seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002 menetapkan masa orang hilang adalah empat tahun. Sementara, masyarakat Melaka didominasi oleh mazhab al-Syafi'i yang berpendapat bahawa penetapan masa orang hilang adalah selama sembilan puluh tahun. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu bagaimana penetapan anggapan mati menurut seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002 dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan anggapan mati sebagai alasan fasakh nikah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penetapan anggapan mati sebagai alasan fasakh nikah menurut seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002 dan untuk menganalisis hukum Islam terhadap penetapan anggapan mati sebagai alasan fasakh nikah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum Islam normatif, dimana suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang dibagi kepada tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum testier.. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah, telaah pustaka yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya. Dari pengeolahan data yang ada maka analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, yaitu menggunakan data referensi baik berupa literature maupun artikel-artikel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan kajian yang penulis lakukan penetapan hukum dalam seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam adalah sangat relevan dibandingkan dengan pemikiran mazhab al-Syafi'i. Ini kerana kondisi masa sekarang dengan adanya alat kecanggihan teknologi mampu mempercepatkan usaha untuk mencari orang yang hilang atau dianggap mati (*mafqud*).

Kata Kunci: *penetapan anggapan mati, fasakh nikah dan hukum islam*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahuwataala SWT, Shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad Sholallahualaihi Wasallam (SAW) yang telah merubah dan merevolusi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafaat di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “Analisis Seksyen 54 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 Mengenai Penetapan Anggapan Mati Sebagai Alasan Fasakh Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam” hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, unyuk itu penulis haturkan rasa terima kasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada

1. Almarhum ayahnda Dr. Hj. Ya’akob bin Md.Amin dan Ibunda Norehan binti Keling yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
2. Kakakku Siti Rahmah binti Ya’akob serta Adikku Adeilah binti Ya’akob teman terbaik, pengingat terbaik untuk selalu semangat menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor, Bapak Dr, Drs, H. Suryan A. Jamrah, MA selaku wakil rektor I, Bapak Dr, H, Ahmad Supardi, MA selaku wakil rektor II, Bapak Dr, H Promadi, MA, Ph, D selaku wakil rektor III dan beserta staf UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr, Drs. Heri Sunandar, MCL selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag.M.Ag selaku wakil dekan II, Bapak Dr, H. Magfirah, MA selaku wakil dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan beserta staf yang telah memberikan pelayanan Akademik selama proses perkuliahan penulis.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi pelayanan Akademik selama proses perkuliahan penulis.
6. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullsh, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang sentiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, MA yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabra dan tak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
8. Bapak Ariffudin Drs, MA selaku Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Teruntuk teman-teman hukum keluarga B 2015, yang telah kebersamai selama duduk di bangku perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-teman seperjuangan Arif Ar-Rasyidin, Raja Ayuni Khairunnisa, Haslina binti Dahlan, Siti Asiyah, Nailatul Fadhillah dan Apriliana Sari, yang turut serta terlibat dan ikut membersamai masukan dan sarannya.

11. Semua pihak yang tak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang merasa ikut membersamai penulisan skripsi ini. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 22 April 2019
Penulis,

AMIERAH BINTI YA'AKOB
NIM.11521205578

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ENAKMEN (UNDANG-UNDANG) KELUARGA ISLAM	
A. Sejarah Perundang-undangan Syari'ah	12
B. Kedudukan dan Penggunaan Undang-Undang Syai'ah Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan.....	16
C. Kedudukan dan Wewenang Undang-undang Syaria'ah di Malaysia	20
D. Kandungan Hukum Keluarga Dalam Enakmen	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH DAN MAFQUD	
A. <i>Fasakh</i>	38
1. Pengertian Fasakh	38
2. Dasar Hukum Fasakh	40
3. Pembagian Fasakh.....	42
4. Beberapa Alasan Fasakh	43
5. Akibat Fasakh.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. <i>Mafqud</i>	49
1. Definisi <i>Mafqud</i>	49
2. Dasar Hukum <i>Mafqud</i>	51
3. Jenis-Jenis Anggapan Mati.....	54
4. Teori Penetapan Anggapan Mati menurut Mazhab Syafi’I.....	56

ANALISA SEKSYEN 54 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI MELAKA TAHUN 2002 MENGENAI ANGGPAN MATI SEBAGAI ALASAN *FASAKH*

A. Penetapan Anggapan Mati menurut Seksyen 54 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negari Melaka tahun 2002.....	59
B. Analisis Hukum Islam menganai Anggapan Mati	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah menyusun aturan-aturan yang lengkap, mulai dari seseorang itu merencanakan hendak menikah hingga ke peringkat perceraian sekiranya hubungan suami istri itu tidak dapat diperbaiki lagi. Perceraian itu pula hendaknya dilakukan dengan *ma'ruf* di mana perceraian itu tidak sepatutnya digunakan untuk menjatuhkan martabat suami atau istri. Islam telah menetapkan peraturan perceraian dengan begitu halus dan teliti agar tidak ada pihak-pihak yang teraniaya. *Enakmen*¹ atau Undang-Undang keluarga Islam Malaysia menjadi rujukan terkait dengan kasus perceraian perkawinan di Malaysia.

Dalam kajian ilmu fikih Islam, penentuan status orang hilang atau *mafqud*, apakah ada yang bersangkutan masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, sangat penting kerana ia menyangkut dengan banyak aspek. *Mafqud* memerlukan kejelasan status kematiannya, kerana status ini merupakan salah satu syarat bisa diambil setiap terhadap hak dan kewajibannya. Oleh kerana itu Allah SWT mendorong supaya umat Islam saling memelihara agama, jiwa, akal, dan harta.²

¹ *Enakmen* Adalah Suatu Undang-Undang Yang Digubal (Dibentuk) Oleh Dewan Undangan (Majlis Yang Mengubal Undang-Undang) Negeri Masing-Masing Negara Bagian Di Malaysia Dan Berlaku Mengikat Bagi Negara Bagian Tersebut Selama Mana Tidak Bertentangan Dengan Perlembagaan Persekutuan. Istilah "*Ordinan*" Digunakan Di Negara Bagian Sarawak Untuk Maksud Yang Sama.

² Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm.127

Islam juga telah memberi hak kepada istri untuk membubarkan pernikahannya melalui beberapa cara yaitu khulu' dan *fasakh*. *Fasakh* berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya boleh diputuskan apabila pihak istri membuat pengaduan kepada Peradilan dan Hakim setelah melalui persidangan.³ Syariat Islam membenarkan wanita yang cukup umurnya memfasakhkan pernikahannya dengan perantaraan qadi atau Hakim Peradilan, dengan alasan-alasan tertentu yang membolehkan istri memperoleh hak perceraian melalui *fasakh*. Sepertimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُقْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir: al- Fath al-I'lam, 2004) Jilid 2, hlm.202-203

⁴ Al-Qu'ran dan terjemahan, *Depertemen Agama RI*, Bandung: CV Diponegoro, 2010)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah SWT memerintahkan kepada kaum lelaki apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, sedangkan ia berhak rujuk, hendaklah ia memperlakukannya dengan baik. Apabila iddahnya hampir habis dan tinggal hanya sisa waktu yang memungkinkan bagi dia untuk rujuk, maka adakalanya memegangnya (yakni merujukinya kembali ke dalam ikatann nikah) dengan cara yang makruf. Hendaklah ia memakai saksi dalam rujukan itu serta berniat mempergaulinya dengan cara yang makruf. Atau adakalanya ia melepaskannya, yakni membiarkannya hingga habis masa iddahnya serta mengeluarkannya dari rumah dengan cara yang lebih baik, tanpa perchekeokan dan tanpa pertengkaran, tanpa saling mencaci.⁵

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam hadis Nabi SAW:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ⁶

Dalam hadis di atas jelas dapat diketahui dan dipahami, bahwa thalaq atau perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan, tetapi perbuatan itu tidak disukai Allah SWT. Sebab perceraian merupakan satu kerusakan atau kehancuran sebuah kerukunan, kedamaian atau ketenteraman rumah tangga.

Para fuqaha dahulu telah memperbincangkan berbagai alasan istri atau suami untuk menuntut *fasakh* dihadapan para hakim.⁷ Para ulama telah

⁵ Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Lebanon, 2012) Jilid 1, hlm,93-94

⁶ Sulaiman bin al-Asy'ah Abu Dawud al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr,t.th) Juz 2.hlm. 255

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri mengetahui ada aib' pada pihak lain sebelum 'aqad nikah itu diketahuinya sesudah 'aqad tetapi ia sudah rela secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya maka ia tidak mempunyai hak lagi untuk meminta *fasakh* dengan alasan aib' itu. Ada delapan (8) aib atau cacat yang membolehkan khiyar di antaranya : tiga berada dalam keduanya (suami istri) yaitu : gila, penyakit kusta dan supak. Dua terdapat dalam laki-laki yaitu 'unah (lemah tenaga batin) dan impoten. Tiga berasal dari perempuan yaitu : tumbuh tulang dalam lubang kemaluan yang menghalangi perserububuhan, tumbuh kemaluan dan tumbuh daging daging dalam kemaluan atau terlalu basah yang menyebabkan hilang kenikmatan perisetubuhan.⁸

Di dalam perundangan Islam, alasan-alasan yang memperbolehkan untuk *fasakh* bagi suami istri adalah berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Alasan *fasakh* yang bisa dikatakan disini adalah ketidakmampuan suami untuk membayar nafkah, ghaib atau dipenjarakan karena ini boleh mendatangkan kemudharatan kepada istri dan keluarga. Kemudharatan yang dimaksudkan disini adalah kemudharatan kepada lima perkara yaitu agama, diri, keturunan, harta dan aqal(maruah).⁹ Ketika suami pergi, entah kemana istri tidak boleh di *fasakhkan* sebelum benar-benar diketahui kemana suami itu pergi. Akan tetapi menurut Syafi'i orang yang

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Ahwal Syaksiyyah Fi Syariat Islamiyah* (Kuwait: Darul al-Qalm, 1990) hlm. 159

⁸ Slemet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) hlm. 74-78

⁹ Ali Muhamad Amdi, *Ahkam Fi Usuli Al-Ahkam*, (Bairut, Lubnan: Maktabah Islami 1406 H) Jilid III, hlm.274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hilang dapat dianggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu maka diperkirakan dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa tenggang waktunya adalah 90 tahun.¹⁰

Berdasarkan peruntukan undang-undang keluarga Islam di Malaysia, masa untuk anggapan mati ialah selama empat tahun hilangnya seseorang sama ada permohonan ini dibuat berdasarkan perwarisan, perwalian atau perkahwinan. Menurut perspektif kekeluargaan Islam, Akta Undang-undang Keluarga Islam Melaka tahun 2002 yang dikenal sebagai anggapan kematian dijelaskan bahwa tenggang waktu bagi orang hilang adalah jika suami perempuan telah mati, atau dipercayai mati, atau tidak didengari lagi beritanya dalam rentang waktu yang ditetapkan atau lebih hingga sampai batas waktu yang layak untuk membolehkan perempuan itu berkawin lagi dan yang demikian dianggap mengikut hukum syara sebagai telah mati.¹¹ Oleh kerana itu, atas permohonan perempuan itu dan selepas dilakukan investigasi yang wajar, mahkamah bisa mengeluarkan dalam bentuk yang telah ditetapkan, suatu perakuan menganggap kematian suami itu dan atas permohonan perempuan itu mahkamah boleh membuat perintah bagi pembubaran perkahwinan atau *fasakh* sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen.

¹⁰ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 446

¹¹ Rujuk seksyen 53-54 karangan, Makmun bin Hj. Md Sabari *Undang-Undang Negeri Melaka* (Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2002) hlm.47-48

Dalam enakmen ini dijelaskan bahwa apabila seorang istri telah kehilangan suami dalam tempoh empat tahun ataupun lebih, maka dibenarkan seorang istri itu untuk menikah dengan laki-laki lain setelah hubungan perkahwinan dengan suami lamanya diputuskan oleh mahkamah.

Di sini dapat dilihat bahwa tuntutan *fasakh* terhadap anggapan mati merupakan satu masalah yang harus di kaji dan diteliti agar para istri mengetahui hak mereka sebagai istri dalam perundangan Islam. Maka dengan demikian penulis berkeinginan untuk menyusun penelitian ini dengan judul **“Analisis Seksyen 54 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 Mengenai Penetapan Anggapan Mati Sebagai Alasan Fasakh Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan hasil kepuasan yang valid, maka penelitian ini dibatasi hanya berkenaan dengan Analisis Seksyen 54 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 Mengenai Penetapan Anggapan Mati Sebagai Alasan Fasakh Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam”.

C. Rumusan Masalah

Kajian dalam penelitian ini di rumuskan:

1. Bagaimana penetapan anggapan mati sebagai alasan *fasakh* nikah menurut seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan anggapan mati sebagai alasan *fasakh* nikah menurut seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1 Tujuan Penelitian ini adalah:

- Untuk menjelaskan penetapan anggapan mati sebagai alasan *fasakh* nikah menurut seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002.
- Untuk menganalisis hukum Islam terhadap penetapan anggapan mati sebagai alasan *fasakh* nikah menurut seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002.

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.
- Memperluas wawasan intelektual kepada umat Islam, para pelaku akademik di bidang hukum terutama tentang kasus tinjauan terhadap umat Islam yang melakukan perkawinan yang tidak sah menurut hukum syarak dan undang-undang negara bagian Melaka.
- Untuk dapat menambah sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif, suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan penetapan anggapan mati sebagai alasan fasakh nikah yang terdapat dalam seksyen 54 enakmen keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: yaitu buku yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian¹², yaitu buku Enakmen Undang-Undang Kekeluargaan Islam Mengenai Melaka tahun 2002. Karangan Makmun bin Hj.Md.Sabari yang diterbitkan oleh Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

¹² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-3, hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Bahan hukum sekunder: yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data¹³, buku-buku seperti Fasakh Pernikahan Mengikut Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam, Salleh Ismail, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUKI) Tahun 2002, Melaka, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Fiqih Sunnah, Muhammad Sayyid Sabiq, dan banyak lagi.
- c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum pelengkap yang digunakan adalah jurnal dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dinamakan metode dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁴. Metode dokumen dalam penelitian ini amat penting, yaitu sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

5. Teknik Analisis

Dari pengeolahan data yang ada maka analisis data menggunakan teknik kualitatif, yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi.

¹³ Ibid., hlm. 133.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 206.

6. Teknik Penulisan.

- Metode Deduktif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan teori secara umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.¹⁵
- Metode Induktif, yaitu menggunakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

BAB I : Penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : Penulis membahaskan tinjauan umum tentang sejarah enakmen undang-undang keluarga Islam

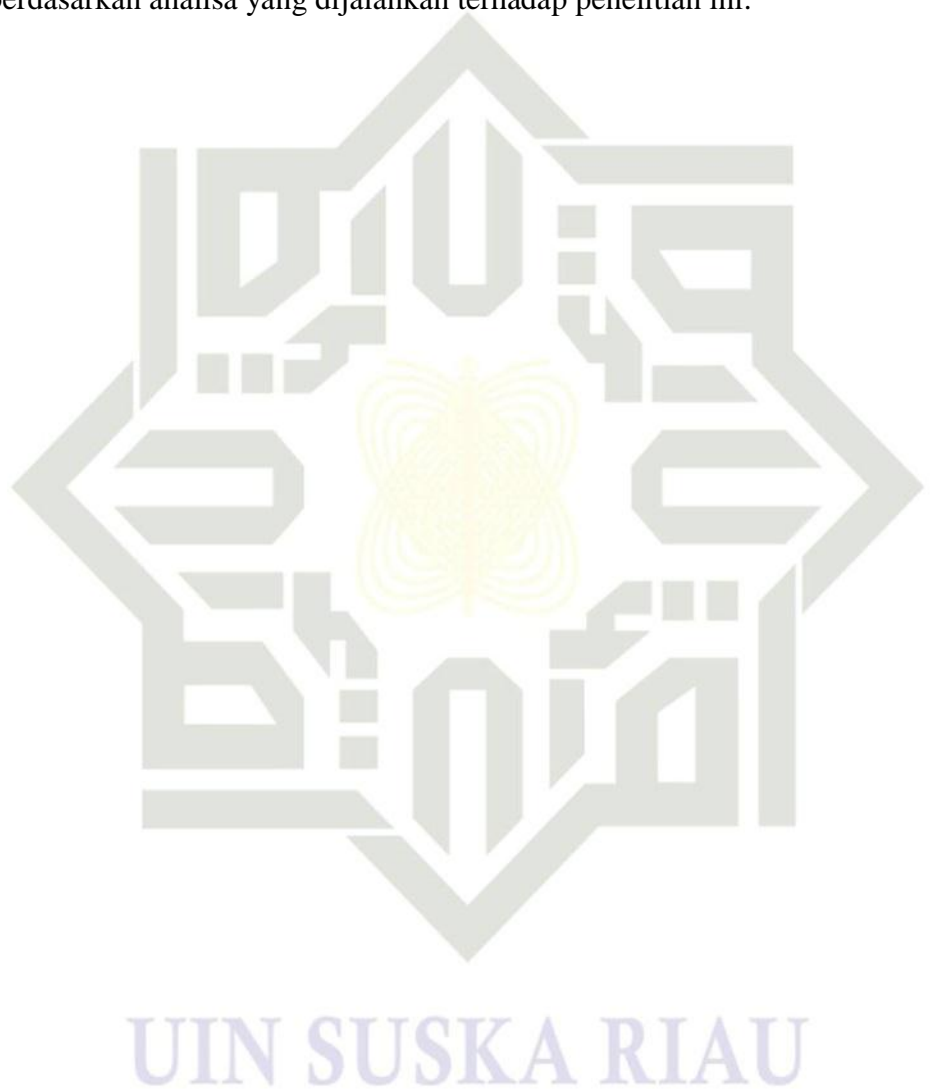
BAB III : Penulis mengetengahkan tinjauan umum tentang *fasakh* nikah yang memuatkan pengertian nikah dan *fasakh* nikah, ruang lingkup *fasakh* nikah dan hal-hal yang berkaitan *fasakh* nikah menurut hukum islam.

BAB IV : Penulis memaparkan analisis Seksyen 54 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002 mengenai

¹⁵ Sutrisni Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Ugm 1980), jil. 1, hlm. 42.

anggapan mati sebagai alasan *fasakh* dan analisis hukum Islam mengenai anggapan mati sebagai alasan *fasakh*.

BAB V : Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ENAKMEN (UNDANG-UNDANG)

KELUARGA ISLAM

Sejarah Perundang-undangan Syari'ah

Secara umum sejarah perkembangan Undang-undang di Malaysia dapat dibagi dalam dua periode yang berbeda. Pertama periode sebelum kedatangan penjajah dan kedua periode setelah kedatangan penjajah. Pada periode pertama Undang-undang dapat diklasifikasikan pada dua jenis perundangan-undangan, yakni:

1. Undang-undang Orang Asli
2. Undang-undang Adat

Adapun pada periode kedua dapat diklafikasikan pada tiga kurun waktu yang berbeda, yakni:

1. Masa Pendudukan Portugis
2. Masa Pendudukan Belanda
3. Masa Pendudukan Inggeris

Menurut kajian sejarah, sebelum kedatangan penjajah, daerah pedalaman dan pesisir pantai, telah didiami oleh golongan-golongan asli yaitu golongan Nigerito, Senoi dan Melayu Asli. Masing-masing golongan memiliki Undang-undang tersendiri yang masih kuno. Golongan Negerito merupakan golongan yang paling teratur dan hidup berpindah-randah (nomaden). Kedua golongan itu dipilih dari orang yang paling tua di antara mereka. Di tangan kedua suku tersebutlah keadilan kemudian dijalankan. Suku ini tidak memiliki

banyak perangkat perundang-undangan. Ukuran bagi setiap kesalahan adalah denda.

Kondisi seperti ini juga terjadi pada golongan Senoi. Ketua suku mempunyai kekuasaan penuh dalam perkara Sipil dan Pidana, namun terdapat perbedaan dalam persoalan hukum pembunuhan. Penentuan hukum bunuh dibicarakan oleh “jama’ah pengadil” yakni kumpulan yang terdiri dari ketua suku dibantu oleh sesiapa dari suku tersebut. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh sanak saudara si pembunuh. Hukuman itu jika bisa dijalankan dengan menggunakan senjata yang digunakan oleh si pembunuh itu untuk melakukan kesalahan tersebut. Adapun kesalahan mencuri, yang kurang berlaku, dihukum dengan diusir keluar dari kelompoknya.¹⁶

Keadaan ini berbeda dengan suku Melayu asli. Mereka dapat dikatakan golongan atau suku yang paing maju jika dibandingkan dengan suku-suku asli lainnya. Suku ini diketuai oleh seorang ketua dengan sebutan “batin”. Di tangan batin, dengan dibantu oleh sesiapa yang mengerti tentang Undang-undang dan adat dari suku tersebut, keadilan ditegakkan.

Dalam Undang-undang suku Melayu asli itu juga, dapat dijumpai adanya pengaruh agama Hindu dan Islam. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam hal pencurian dan penzinaan. Hukuman yang dikenakan bagi pelaku pencurian dan penzinaan adalah dengan dijemur di tengah terik mentari atau ditenggelamkan.

Adapun dalam hal pembunuhan, maka hukuman yang dikenakan adalah denda atau qisas. Dalam hal waris, pembagian dinisbahkan atau

¹⁶ Ahmad bin Ibrahim dan Ahilemah binti Joned, *Sistem Undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985) hlm, 7-8

disandarkan pada pembagian dua banding satu (2:1), dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.¹⁷ Semua Undang-undang yang dibuat oleh suku-suku tersebut memiliki tujuan yang sama dengan pembuatan Undang-undang pada umumnya yaitu untuk menjaga kepentingan dan keselamatan umat.

Undang-undang kedua yang memegang peran penting sebelum kedatangan penjajah adalah Undang-undang Adat. Undang-undang Adat Papatih dan Adat Temenggung. Undang-undang Adat Papatih dibawa masuk dari Minangkabau (Sumatera Barat) pada abad ke-16 dan masih dijalankan hingga hari ini, terutama di Negara Bagian Sembilan. Dengan kata lain Undang-undang Adat Papatih juga mendapat tempat tersendiri dalam pelaksanaan perundangan di Negara Bagian Sembilan.

Adapun perundang-undangan Adat Temenggung adalah Undang-undang otokrasi yang dijalankan pada masa kesultanan Melayu Melaka dan di daerah-daerah lain di Semenanjung Melaka. Undang-undang ini juga dibawa dari Minangkabau, namun telah mengalami banyak perubahan di bawah pengaruh agama Hindu. Unsur matriakhal yang terlihat kental dalam adat Minangkabau, dalam Undang-undang Adat Temenggung telah hilang digeser oleh unsur patriakhal.¹⁸ Undang-undang diterima dan dijalankan oleh hampir semua masyarakat di daerah-daerah Semenanjung Melaka kecuali Negara Bagian Sembilan, hingga jatuhnya tanah Melayu ketangan penjajah Inggris.

Keadaan perundang-undangan di Tanah Melayu mengalami perubahan sedikit demi sedikit, bermula sejak kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada

¹⁷ *Ibid*, hlm, 9-10

¹⁸ *Ibid*, hlm, 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1511 disusul kemudian oleh Penjajah Belanda. Namun demikian, penjajah kedua bangsa Eropa tersebut tidak membawa banyak perubahan terhadap sistem perundang-undangan di tanah Melayu. Ini disebabkan masih diperbolehkannya orang-orang Melayu untuk melaksanakan Undang-undang yang ada, guna menyelesaikan persengketaan yang melibatkan persoalan-persoalan non-melayu (Portugis dan Belanda), maka Undang-undang yang dipergunakan adalah Undang-undang mereka tersendiri.¹⁹

Perubahan besar atas perundang-undangan Adat Melayu yang saat itu berlaku secara luas di tanah Melayu terjadi pada masa pendudukan Inggris pada tahun 1825, yakni setelah perjanjian antara Inggris dan Belanda yang dibuat pada tahun 1824.²⁰ Inggris secara perlahan mulai memasukkan Undang-undang mereka ke dalam perundang-undangan Melayu. Langkah ini mulai dijalankan di daerah Selat seperti Pulau Penang, Melaka dan Singapura. Di Pulau Penang Undang-undang Inggris mulai dijalankan dengan dibuatnya Piagam Keadilan Pertama pada tahun 1807, disusul dengan Piagam Keadilan Kedua yang dikenal sebagai Piagam Keadilan Diraja di Negeri Melaka dan Singapura pada tahun 1826.

Piagam Keadilan merupakan upaya merekonstruksi perundang-undangan Adat Melayu agar senafas dengan perundang-undangan Inggris. Dengan sendirinya piagam ini telah membuka lebar masuknya Undang-undang Inggris ke dalam Undang-undang Melayu, sehingga terjadi perubahan cukup signifikan atas Undang-undang Melayu.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 14

²⁰ *Ibid*, hlm, 15

Kokohnya kekuasaan Inggris di tanah Melayu, semakin meluas lagi kekuasaan mahkamah-mahkamah keadilan Prince of Wales Island di daerah-daerah tanah Melayu. Usaha rekonstruksi tersebut tidak berhenti hanya sampai disana, usaha tersebut terus berlanjut dengan diterbitkannya Piagam Keadilan ketiga pada tahun 1855. Piagam ini tidak dimaksudkan untuk melakukan perubahan-perubahan atas Undang-undang, melainkan lebih difokuskan pada penegakan mahkamah dan Undang-undang yang telah ada, agar menjadi lebih teratur.²¹

Adapun di daerah-daerah Melayu lainnya, seperti Semenanjung, Undang-undang Common Law Inggris mulai dibawa masuk pada tahun 1937 melalui pembuatan Undang-undang Sipil negeri-negeri Melayu bersatu. Langkah diperluas lagi pada tahun 1956, dimana Undang-undang Sipil Inggris telah dimasukkan kedalam Ordinan Undang-undang Sipil Melayu, yang kemudian berlaku untuk seluruh daerah Persekutuan Tanah Melayu hingga saat ini.²²

B. Kedudukan dan Penggunaan Undang-Undang Syai'ah Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan.

Undang-undang Islam telah mulai dipraktekan di Tanah Melayu sejak abad ke-14, yaitu sejak zaman kesultanan Melayu Melaka. Hal ini berawal dari masuknya pengaruh agama Islam di tanah Melayu melalui pedagang-pedagang Arab dan India. Para pedagang-pedagang tersebut menjalankan

²¹ Mardiana Abdul Rahim, Sejarah Pelaksanaan Undang-undang di Pulau Penang, dalam (Jurnal Syariah jilid 7 edisi Januari, 1999) hlm, 33-34

²² Ahmad bin Ibrahim dan Ahilemah binti Joned, *Op.Cit*, hlm, 20-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan Islam yang berdasarkan kepada madzhab Imam Syafi'i, yang ini kemudian memberikan corak dan warna Islam dalam perundang-undangannya di Tanah Melayu saat ini.

Di zaman kerajaan Melaka, suatu Undang-undang dikenal sebagai Kanun Melaka telah diterima secara luas sebagai sebuah Undang-undang Islam, meski Undang-undang tersebut tidak sepenuhnya merujuk pada sumber-sumber Islam melainkan juga merujuk pada adat isitadat Melayu. Namun demikian isi Kanun Melaka sangat besar dipengaruhi oleh kitab *Fath al-Qarbi karya Ibn Qosim al-Ghazzi*. Undang-undang ini meliputi beberapa kumpulan peraturan perundangan seperti Undang-undang Melaka asal, laut, keluarga Islam, jual beli, dan Undang-undang Hukum Acara Islam.²³

Berkaitan dengan persoalan Syari'ah, Undang-undang Melaka mengakomodir Undang-undang Pidana Islam dengan menerapkan sanksi qisas, hudud, ta'zir dan diat (pasal; 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 36, 39, 41, 42 dan 43), hal-hal yang terkait dengan ekonomi Islam diatur dalam pasal 29 hingga 34, adapun yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam pasal 25 hingga 28.²⁴

Namun demikian, pengalaman ketentuan-ketentuan Hukum Islam tidaklah murni dan menyeluruh. Hal ini kerana adanya pencampur adukan Undang-undang Adat Temenggung dan beberapa kepercayaan agama lain.

²³ Mohamad Azam, *Quo Vadis Kekuasaan dan Kedudukan Mahkamah Syari'ah di Malaysia Abad ke 20*, (Jurnal Syari'ah edisi Juli, 2000, jilid 8), hlm, 104

²⁴ Hamid Jusoh, *Pemakaian Undang-undang Islam kini dan Masa Depan nya di Malaysia*, Dalam Ahmad Ibrahim, *Al-Ahkam Undang-undang Masa Kini*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), hlm, 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh, hukuman pidana berkenaan dengan pencurian didasarkan pada Hukum Islam dengan ditambah denda mengikut hukum adat.²⁵

Secara umum Undang-undang Islam merupakan rujukan utama yang dipakai secara luas dalam menyelesaikan berbagai perkara, termasuk dalam perkara perdata dan pidana, di samping Undang-undang Adat Temenggung, Papatih, dan pengaruh Hindu, pada masa sebelum kedatangan penjajah di tanah Melayu.

Kemudian pemakaian Undang-undang Islam semakin tersebar ke daerah-daerah lain selain Melaka, seperti Pahang pada tahun 1595, Kedah pada tahun 1605, Johor pada tahun 1789 dan Perak pada tahun 1878.²⁶ Penggunaan Undang-undang Islam pada saat itu lebih luas penggunaannya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keagamaan seperti perkawinan, perceraian, dan pewarisan.

Seiring datangnya penjajah Portugis dan Belanda dan semakin goyah ketika masa penjajahan Inggris. Menurut kebanyakan penulis, pada masa penjajahan Portugis dan Belanda pemakaian Undang-undang Islam masih tidak banyak mengalami perubahan. Ini disebabkan baik Portugis maupun Belanda tidak mau ikut campur dalam pelaksanaan undang-undang Pribumi. Pada saat itu Undang-undang Eropa berlaku hanya untuk orang Eropa dan bagi pribumi berlaku Undang-undang Pribumi itu sendiri.

Perubahan yang cukup signifikan atas kedudukan, fungsi dan peran Undang-undang Islam di tanah Melayu terjadi pada masa penjajahan Inggris

²⁵ Ahmad bin Ibrahim dan Ahlimeah binti Joned, *Op.Cit*, hlm, 11-12

²⁶ Hamid Jusoh, *Op.Cit*, hlm, 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di awal abad ke 19. Undang-undang Islam pada masa itu hanya diakui dan digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkup agama seperti perkawinan, penceraian dan waris. Banyak kesalahan terjadi atas Undang-undang Islam pada masa ini, dimana separuh Undang-undang Adat diakui sebagai Undang-undang Islam oleh para hakim berdasarkan perintah sultan. Adapun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkara-perkara pidana diambil alih sepenuhnya oleh Undang-undang Inggris, menggusur Undang-undang Islam dan Adat yang ada.²⁷

Pihak Inggris telah membawa masuk Undang-undang Common Law mereka sedikit demi sedikit sehingga sampai di tahun 1956 dimana Undang-undang Sipil Inggris dimasukkan ke dalam Ordinan Undang-undang Sipil Melayu yang berlaku secara umum di wilayah-wilayah persekutuan Melayu.²⁸ Dengan demikian jelaslah sudah posisi Undang-undang Islam pra dan pasca penjajahan Inggris. Pasca penjajahan Inggris Undang-undang Islam hanya diatasi penggunaannya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan agama (nikah, cera, talak, dan wairs). Sementara perkara-perkara pidana ditundukan secara mutlak kepada Undang-undang Common Law Inggris.

Pasca kemerdekaan, dengan diadopsinya Undang-undang Sipil dalam perundang-undangan Malaysia tidak serta merta mengubur perundang-undangan Islam. Meski harus diakui bahwa hadirnya Undang-undang Sipil telah menjadikan Undang-undang Islam sebagai Undang-undang nomor dua di

²⁷ Ahmad bin Ibrahim dan Ahilemah binti Joned, *Op.Cit*, hlm 15

²⁸ *Ibid*, hlm, 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaysia. Keberlangsungan Undang-undang Syari'ah kendati terbatas pada hanya persoalan hukum keluarga, namun tetap dipertahankan pemberlakuannya di setiap daerah negara bagian. Hal ini berdasarkan amanat konsitusi Negara Malaysia yang menyebutkan bahwa: Pelaksanaan Undang-undang Syari'ah berada dibawah kekuasaan Mahkamah Syari'ah di masing-masing negara bagian. Al hasil berbagai produk perundangan Syari'ah tetap lahir dan dijalankan di setiap negara bagian.

Sebagai catatan misalnya di daerah Selangor lahir Undang-undang Islam Selangor 1952, pembutana Undang-undang Syariah Terenggan 1955, Undang-undang Agama Islam Pahang 1956, Undang-undang Islam Melaka 1959, Pulau Penang 1959, Negara Bagian Sembilan 1960, Kedah 1962, Perlis 1964, Perak 1956, Pembuatan Mahkamah Syari'ah dna perkawinan Kelantan 1966, agama dan adat Kelantan 1966, Undang-undang Islam Johor 1978, Sabah 1971 dan Ordinan Majlis Islam Serawak tahun 1978.²⁹ Di antara Undang-undang Islam setiap negeri bagian tidak ada perbedaan satu dengan yang lain, hanya saja waktu pengembangan Undang-undang Islam yang membedakannya.

C. Kedudukan dan Wewenang Undang-undang Syaria'ah di Malaysia

Konstitusi Malaysia secara resmi telah mengakui bahwa Islam merupakan agama resmi Negara, tidak berarti bahwa keberadaan agama lainnya dilarang keberadaannya. Agama-agama lain tetap diberi tempat dan

²⁹ Hamid Jusoh, *Op.Cit*, hlm, 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya dijamin oleh Negara.³⁰ Ketentuan tersebut memiliki arti penting bagi umat muslim di Malaysia, kerana klausul pasal tiga tersebut bagaimanapun dapat dijadikan entri poin bagi lahirnya perundang-undangan Islam di Malaysia. Meski tujuan awal pencantuman Islam sebagai agama resmi bukanlah bermaksud mendirikan negara Islam maupun mewujudkan Undang-undang Islam, melainkan hanya untuk mengkomodir Islam dalam seremonial-seremonial penting acara pemerintahan.³¹

Pencatuman Islam sebagai agama resmi negara Malaysia boleh dikatakan sebagai penjaga tegaknya syari'at Islam di Malaysia di tengah gempuran sekularisme sisa panjang kolonialisme Barat di bumi Malaysia. Adapun ketentuan mengenai Undang-undan Syari'ah secara khusus diatur dalam konsitusi Malaysia. Konsitusi (perlembagaan persekutuan Malaysia) memberikan kewenangan kepada negara-negara bagian yaitu masing-masing negara bagian diberi kuasa untuk membuat undang-undang Islam sendiri dan dalam pelaksanaannya membentuk lembaga-lembaga terkait seperti Majlis-majlis agama Islam, Mahkamah Syari'ah dan sebagainya.³²

Meskipun Islam diterima oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia sebagai agama, namun penerimaan tersebut tidak sampai menjadikan Undang-undang Islam sebagai Undang-undang Negara. Selaras kedudukan agama Islam di bawah kekuasaan raja-raja negeri, Perlembagaan Malaysia

³⁰ Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Perlembagaan Persekutuan*, (Kuala Lumpur: Berlia, 1996), hlm, 2

³¹ Hasan Bahrom, *Perlembagaan Isu Pelaksanaan Undang-undang Islam*, Jurnal Syari'ah Jilid 7, edisi Januari, 1999, hlm, 106

³² Mahmood Zuhdi Abd Majid, pengantar Undang-undang Islam di Malaysia, ect II, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2004), hlm, 106

telah menetapkan bahwa Undang-undang Syari'ah adalah urusan negeri-negeri. Dalam jadual kesembilan pasal ke-2 dijelaskan bahwa:

“kecuali mengenai wilayah-wilayah Persekutaun Kuala Lumpur dan Labuan, hukum Syarak dan Undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak berhubungan dengan mewarisi harta wasiat dan tak berwasiat, pertunangan, perkawinan, perceraian, maskawin, nafkah, pengambilan anak angkat, taraf anak, penjagaan anak, pemberian, pembagian harta dan amanah bukan khairat; wakaf Islam dan takrif serta peraturan mengenai amanah khairat dan tharikat agama, pelantikan pemegang-pemegang amanah dan perbezaan bagi agama, pelantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dan khairat, yayasan, amanah. Khairat dan yayasan khaerat yang dijalankan kesemuanya sekali dalam negeri; adat istiadat melayu; zakat fitrah dan baitul mal atau hasil agama Islam yang seumpamanya; masjid atau mana-mana tempat sembahyang awam untuk orang Islam; mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang menagnut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam, kecuali mengenai perkara-perkara yang teramsuk dalam senarai persekutuan; keanggotaan, penyusunan dan cara bagi mahkamah-mahkamah syari'ah yang ada mempunyai bidang kuasa hanya ke atas prang-orang yang menganut agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali yang setakat diberi oleh Undang-undang Persekutuan; mengawal pengembangan iktikad dan kepercayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara orang-orang yang menganut agama Islam; menentukan perkara-perkara hukum syarak dan iktikad dan adat istiadat Melayu.³³

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Negara-negara bagian melalui badan perundang-undangan masing-masing berkuasa membuat Undang-undang Syari'ah dan membentuk organisasi pembuat dan pelaksana Undang-undang seperti majlis-majlis agama Islam dan mahkamah-mahkamah syari'ah. Undang-undang Syari'ah diberikan kewenangan untuk mengatur masalah hukum keluarga Islam (hukum perdata) dan pidana. Untuk hukum keluarga (hukum perdata) kewenangan diberikan secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pernikahan, mulai dari pertunangan, syarat-syarat perkawinan, maskawin, pencatatan pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, perceraian, masa iddah, rujuk, status anak, hak asuh anak, poligami, perwalian, pengangkatan anak dan adopsi.
2. Kewarisan, berkenanaan dengan ahli waris dan masing-masing baginya.
3. Wasita, berkenanaan dengan syarat-syarat dan yang tidak boleh menerima wasiat serta batalnya wasiat dipegangkatan anak (adopsi), status anak, hak asuh anak, warisan, dan wasiat. Sedangkan dalam bidang pidana membuat dan menghukum dan pecabutannya.
4. Hibah
5. Zakat dan Wakaf

Sedangkan dalam bidang pidana secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁴

³³ Ibid, hlm, 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kesalahan yang berhubungan dengan 'aqidah seperti pemujaan salah, doktrin palsu, mengembangkan doktrin agama, dan dakwaan palsu.
2. Kesalahan yang berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya, seperti menghina ayat al-Quran atau hadith dan menghina atau meningkari pihak berkuasa agama, tidak menunaikan sembahyang Jumaat, tidak menghormati Ramadhan, tidak membayar zakat atau fitrah, menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama, berjudi dan minuman yang memabukkan.
3. Kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan, pelacuran, pesetubuhan luar nikah, liwat (sodomi), khalwat, orang lelaki berlagak seperti perempuan, perbuatan tidak sopan di tempat umum.
4. Kesalahan-kesalahan seperti memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu, memusnahkan atau mencemarkan masjid, atau surau, pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa, pembayaran tak sah akan zakat atau fitrah, menghalang pasanagan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri, menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam, qazaf, dan penyalahgunaan tanda halal.

Walau bagaimanapun negeri-negeri tidaklah berkuasa sepenuhnya membuat Undang-undang dan lembaga seperti itu. Sebaliknya ia terkait dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan

³⁴ Hukum yang diberikan atas kesalahan-kesalahan tersebut berupa denda tidak diperbolehkan melebihi 5000 Ringgit dan atau penjara kurungan tidak melebihi dari tiga tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai Undang-undang Syari'ah yang mengatur masalah pidana tersebut dapat dilihat pada buku Undang-undang Syari'ah Wilayah-Wilayah Persekutuan, disusun oleh Lembaga Penyelidikan Undang-undang, (Selangor; International Law Book Services), hlm, 5-28

sendiri secara keseluruhannya. Jelasnya setiap Undang-undang Syari'ah yang akan diubah dan dibentuk oleh masing-masing negeri tidak boleh bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, sebagaimana diatur dalam pasal empat yang berbunyi:

*“Perlembagaan adalah Undang-undang utama persekutuan dan apa-apa Undang-undang yang diluluskan setelah hari merdeka dan yang berkenaan dengan perlembagaan ini hendaklah terbatal sekadar yang berlawanan ini”*³⁵

Satu hal lagi berkaitan dengan kebebasan negeri-negeri dalam merubah dan melaksanakan Undang-undang Syari'ah ialah bahwa Undang-undang tersebut hanya berlaku untuk umat muslim saja. Hal ini jelas dapat terlihat dalam ketentuan jadwal kesembilan pasal dua, sebagaimana telah disebut di atas. Ini juga sesuai dengan kehendak kebebasan beragama dan mengamalkan ajaran agama masing-masing orang di Malaysia. Pasal 11 ayat 1 berbunyi: *“Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya”*.

Konsitusi mengamanatkan bahwa pelaksanaan Undang-undang Syari'ah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Syari'ah di masing-masing negara bagian. Secara umum ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pembuatan Undang-undang Syari'ah di setiap negeri relatif sama. Jika pun terdapat perbedaan hanya sebatas pada redaksi atau ayat-ayatnya saja, sedang dalam ketentuan isi bisa dipastikan sama.³⁶

³⁵ Mahmood Zuhdi Abd Majid, *Op.Cit*, hlm, 106

³⁶ Ahmad bin Muhamad Ibrahim dan Ahlilemah binti Jusoh, *Op.Cit*, hlm, 67

Adapun sistem pelaksanaan Undang-undang Syari'ah tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Sipil. Letak bedanya hanya pada wilayah kekuasaannya saja. Undang-undang Syari'ah hanya berlaku untuk orang Islam saja, serta kewenangannya yang lebih rendah dari Undang-undang Sipil. Apabila pihak Mahkamah Syari'ah menjatuhkan hukuman pidana atas seseorang yang dikeranakan kesalahannya, maka pihak Mahkamah Syari'ah harus menanggapi terhadap permohonan dari terpidana seperti yang tersebut dalam seksyen 80, mahkamah akan meminta pihak pengacara dan polisi untuk membawa terpidana (apabila telah dimasukkan) ke penjara (jika dia dihukum penjara). Jika terpidana dijatuhkan hukuman membayar denda, dan dia mampu membayarnya dalam waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. Dia hanya akan dibebaskan dengan bersyarat. Pihak Mahkamah Syari'ah diharuskan mengikuti kaedah-kaedah Undang-undang Keterangan Islam berkaitan terhadap status, keperibadian dan jumlah saksi-saksi. Di samping itu, Mahkamah Syari'ah juga diharuskan memberi perhatian terhadap Undang-undang keterangan yang ada.

Mahkamah Syari'ah ialah institusi kehakiman yang menangani seta menjatuhkan hukuman kepada orang Islam yang berperkara(perdata) dan pidana agama sesuai kewenangan yang telah ditetapkan. Adapun urutan hierarki Mahkamah Syari'ah di setiap negara bagian adalah sebagai berikut:³⁷

1. Mahkamah Rendah Syari'ah

Mahkamah Rendah Syari'ah berkedudukan di setiap Kabupaten yang menangani perkara-perkara untuk wilayahnya saja sebagai

³⁷ Ibid, hlm, 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan tingkat pertama. Adapun wewenangnya meliputi perkara pidana dan perdata.

2. Mahkamah Tinggi Syari'ah

Mahkamah Tinggi Syari'ah merupakan lembaga Peradilan Tingkat Tinggi yang berkedudukan di ibu kota Negara bagian (privinsi). Mahkamah ini diketuai oleh seorang Qodhi Besar tugasnya mengawasi dan mengatur semua Qadhi yang ada di kabupaten (Mahkamah Rendah Syari'ah). Sedangkan wewenangnya meliputi bidang jinayah (pidana) dan perdata yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syari'ah dengan kata lain Mahkamah Tinggi Syari'ah adalah peradilan tingkat banding.

3. Mahkamah Rayuan Syari'ah

Mahkamah Rayuan Syari'ah merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri terdiri dari tiga anggota yaitu Mufti Kerajaan dan dua orang yang telah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan. Hanya berwenang untuk Mahkamah Tinggi Syari'ah. Mahkamah Rayuan Syari'ah adalah pengadilan tingkat kasasi dalam ruang lingkup Mahkamah Syari'ah.

Mahkamah Syari'ah mempunyai kekuasaan menjalankan Undang-undang Syari'ah di setiap Negara bagian. Namun ia hanya terbatas pada hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang melibatkan orang Islam saja. Ketentuan pasal 121 (1A) Pindaan 1989 menyatakan bahwa mahkamah-mahkamah yang disebutkan dalam pasal (1) tidak boleh menangani perkara-perkara yang ada dalam kekuasaan Mahkamah Syari'ah.³⁸ Secara tidak langsung ketentuan ini menunjukkan supremasi Undang-undang Syari'ah atas

³⁸ Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Op.Cit*, hlm, 165

Undang-undang lainnya. Dengan ketentuan di atas Mahkamah Sipil tidak boleh menangani dan ikut campur dalam hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang telah dibicarakan dan diputus oleh hakim di Mahkamah Syari'ah (rendah dan tinggi) dan ada upaya-upaya banding maka perkaranya tidak boleh diteruskan ke Mahkamah Sipil, tetapi harus tetap dibawah kekuasaan Mahkamah Rayuan Syari'ah.

Namun demikian terdapat beberapa kelemahan mendasar yang sampai hari ini masih dapat kita jumpai, terutama dalam kekuasaan Mahkamah Syari'ah itu sendiri. Kelemahan tersebut terlihat jika terjadi pertentangan antara Undang-undang Syari'ah yang dirubah di bawah kekuasaan negara bagian dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konsitusi Malaysia, maka dengan sendirinya Undang-undang Syari'ah di negara bagian itu dibatalkan.

Selain itu ketentuan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan orang Islam yang merupakan kekuasaan Mahkamah Syari'ah juga ikut terbatalan, alasannya Undang-undang Islam tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan bersandar pada kuasa pemerintahan. Sebagai contoh, Mahkamah Syari'ah tidak berhak menangani masalah harta warisan, sekalipun berkaitan dengan harta orang Islam dikerenakan ia berada dibawah kewenangan akta probet dan akta pusaka kecil. Hakin dalam hal ini hanya berfungsi untuk mengesahkan pembagian-pembagian waris sesuai dengan ketentuan akta tersebut. Adapun pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum fara'id, hukuman dan denda yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam Mahkamah Syari'ah adalah tidak melebihi daripada 5000 ringgit atau tiga tahun penjara atau enam kali cambuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Undang-undang Syari'ah di Malaysia diatur dalam ketentuan pasal 121 (1A) pelebagaan Persekutuan Malaysia dan Pembagian antara negara bagian dan pusat (federal). Bagi tujuan tersebut Perlebagaan Persekutuan memperuntukan jadwal 9 pasal 2, menyatakan bahwa kekuasaan Mahkamah Syari'ah hanya terbatas pada orang-orang Islam mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya, tetapi tidak dalam hal sanksi pidana yang jumlahnya melebihi 5000 ringgit, kecuali Undang-undang persekutan mengaturnya.³⁹

Kekuasaan Mahkamah Syari'ah di Malaysia dilaksanakan oleh masing-masing negara bagian yang diketuai oleh raja-raja atau sultan di masing-masing negara bagian. Bagi negara bagian yang tidak memiliki sultan, maka ketua dijabat oleh yang di Pertuan Agung. Penggunaan Undnag-undang Syari'ah dalam perundangan di Malaysia dapat dilihat dalam perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti pertunangan, perkawinan, nafkah, perceraian, penjagaan anak, pengambilan anak, pembagian waris, pembagian harta bersama serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan agama Islam.

Sungguhpun terdapat ketentuan di dala Undang-undang Persekutuan (Konsitusi Malaysia) bahwa Islam sebagai agama resmi negara dan ketentuan untuk melaksanakan Undang-undang Syari'ah, tetapi pelaksanaannya jauh berbeda denga apa yang telah diamalkan pada zaman Rasulullah maupun zaman khulafa' ar-rasyidin. Di zaman Rasulullah pemakaian Undang-undang Syari'ah dilaksanakan secara menyeluruh dan konsekuen. Namun di Malaysia

³⁹ Ibid, hlm, 315

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan Undang-undang Syari'ah terbatas pada masalah-masalah tertentu saja. Namun demikian Undang-undang Common Law Inggris justru mendapat tempat utama walaupun meuai pro kontra, selain itu sumber rujukan utama sistem perundang-undangannya pun berbeda, karena sistem Undang-undang Malaysia lebih disandarkan pada undang-undang yang dibawa oleh Inggris, sedangkan rujukan pada zaman nabi maupun sahabat adalah al-Quran dan Sunnah.

D. Kandungan Hukum Keluarga Dalam Enakmen

ENAKMEN 12 TAHUN 2002 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

SUSUNAN SEKSYEN

BAHAGIAN I -

PERMULAAN

- | | |
|------------|--|
| Seksyen 1. | Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. |
| Seksyen 2. | Tafsiran |
| Seksyen 3. | Kecualian prerogatif |
| Seksyen 4. | Pemakaian |
| Seksyen 5. | Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam. |
| Seksyen 6. | Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini. |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAHAGIAN II – PERKAHWINAN

- Seksyen 7. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan.
- Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan.
- Seksyen 9. Pertalian yang melarang perkahwinan.
- Seksyen 10. Orang daripada agama lain
- Seksyen 11. Perkahwinan tak sah
- Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.
- Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki
- Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan.
- Seksyen 15. Pertunangan

Permulaan Kepada Perkahwinan

- Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin.
- Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin.
- Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie.
- Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah.
- Seksyen 20. Tempat perkahwinan
- Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian
- Seksyen 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan.
- Seksyen 23. Poligami
- Seksyen 24. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-kedutaan, dsb.,Malaysia di luar negeri.

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

- Seksyen 25. Pendaftaran
- Seksyen 26. Perakuan nikah dan surat perakuan ta'liq.
- Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau salah di sisi undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seksyen 28. Pelantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam
- Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan.
- Seksyen 30. Salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.
- Seksyen 31. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri Melaka.
- Seksyen 32. Daftar yang tidak sah di sisi undang-undang.
- Seksyen 33. Pendaftaran sukarela perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang.
- Seksyen 34. Kesan pendaftaran di sisi undang-undang.

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PERUNTUKAN PELBAGAI YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

- Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.
- Seksyen 36. Pelanggaran
- Seksyen 37. Gangguan terhadap perkahwinan.
- Seksyen 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.
- Seksyen 39. Akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.
- Seksyen 40. Kesalahan yang berhubungan dengan akad nikah perkahwinan.
- Seksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa.
- Seksyen 42. Membetulkan kesilapan.
- Seksyen 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan.
- Seksyen 44. Bukti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

- Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat apa-apa perintah.
- Seksyen 46. Pertukaran agama.
- Seksyen 47. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah.
- Seksyen 48. Timbang tara oleh Hakam.
- Seksyen 49. Perceraian khul' atau cerai tebus talaq.
- Seksyen 50. Perceraian di bawah ta'liq atau janji.
- Seksyen 51. Perceraian dengan li'an.
- Seksyen 52. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'.
- Seksyen 53. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh.
- Seksyen 54. Anggapan mati.
- Seksyen 55. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan.
- Seksyen 56. Pendaftaran perceraian.
- Seksyen 57. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah.
- Seksyen 58. Mut'ah atau pemberian sugu hati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.
- Seksyen 59. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh.

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

- Seksyen 60. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi isteri, dan kesan nusyuz.
- Seksyen 61. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi seseorang tertentu.
- Seksyen 62. Pentaksiran nafkah.
- Seksyen 63. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.
- Seksyen 64. Mengkompaun nafkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seksyen 65. Lamanya tempoh perintah nafkah.
- Seksyen 66. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.
- Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.
- Seksyen 68. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.
- Seksyen 69. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya.
- Seksyen 70. Menuntut tunggakan nafkah.
- Seksyen 71. Nafkah sementara.
- Seksyen 72. Hak tempat tinggal.
- Seksyen 73. Kewajipan menanggung nafkah anak.
- Seksyen 74. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.
- Seksyen 75. Kuasa Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak.
- Seksyen 76. Kuasa Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak.
- Seksyen 77. Kuasa Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.
- Seksyen 78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.
- Seksyen 79. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai anggota keluarga.
- Seksyen 80. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.
- Seksyen 81. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sah taraf.

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Hadhanah atau Penjagaan Kanak-Kanak

- Seksyen 82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak.
- Seksyen 83. Kelayakan yang perlu untuk penjagaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang.
- Seksyen 85. Lamanya penjagaan.
- Seksyen 86. Penjagaan anak tak sah taraf.
- Seksyen 87. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.
- Seksyen 88. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.

Penjagaan ke atas Orang Dan Harta

- Seksyen 89. Orang yang berhak kepada penjagaan.
- Seksyen 90. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih.
- Seksyen 91. Pelantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.
- Seksyen 92. Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.
- Seksyen 93. Penjaga bersama dengan ibu.
- Seksyen 94. Perubahan kuasa penjaga harta.
- Seksyen 95. Pemecatan penjaga.
- Seksyen 96. Cagaran hendaklah diberi.
- Seksyen 97. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.
- Seksyen 98. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.
- Seksyen 99. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak daripada pendapatan.
- Seksyen 100. Perintah khas mengenai harta kecil.
- Seksyen 101. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
- Seksyen 102. Perintah larangan oleh Mahkamah.
- Seksyen 103. Penjaga bagi anak yatim.
- Seksyen 104. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dll.
- Seksyen 105. Kuasa Mahkamah menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksyen 106. Kuasa Mahkamah membatalkan dan manahan perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan nafkah.

Seksyen 107. Injunksi terhadap gangguan.

Seksyen 108. Perintah tegahan melupuskan harta sepencarian.

BAHAGIAN VIII – PELBAGAI

Seksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Melaka.

Seksyen 110. Pengiktirafan perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan, dsb., di Negeri Melaka.

Kesahtarafan Anak

Seksyen 111. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa.

Seksyen 112. Kelahiran lebih daripada empat tahun selepas pembubaran perkahwinan.

Seksyen 113. Kelahiran selepas pengakuan bahawa ‘iddah telah tamat.

Seksyen 114. Persetubuhan syubhah.

Seksyen 115. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.

Seksyen 116. Anggapan daripada pengakuan boleh dipatahkan.

Seksyen 117. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam ‘iddah.

Seksyen 118. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa.

Seksyen 119. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa.

Seksyen 120. Pengakuan tidak boleh dibatalkan.

Perintah Supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 121. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.

Pembahagian Harta Sepencarian

Seksyen 122. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.

Rayuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksyen 123. Rayuan.

BAHAGIAN IX – PENALTI

Seksyen 124. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah.

Seksyen 125. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.

Seksyen 126. Tidak membuat laporan.

Seksyen 127. Meninggal langsung isteri.

Seksyen 128. Menganiaya isteri atau suami.

Seksyen 129. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.

Seksyen 130. Isteri tidak menurut perintah.

Seksyen 131. Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan.

Seksyen 132. Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai.

Seksyen 133. Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah.

Seksyen 134. Percubaan dan subahat.

BAHAGIAN X – AM

Seksyen 135. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah.

Seksyen 136. Pemansuhan.⁴⁰

⁴⁰ Makmum Bin Hj. Md. Sabari, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002*, (Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2002), hlm, 3-9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH DAN MAFQUD

A. Fasakh

1. Pengertian Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata “*fasakh*” berasal dari bahasa arab فسح – يفسح – فساح yang berarti batal atau rusak.⁴¹

Sedangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut Dr. Ahmad Al Ghundur

والفسخ هو نقض العد وازالة الحل الذي كان يترتب عليه⁴²

Artinya:

“*Fasakh* adalah batal akad (pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya”

- b. Menurut Muhammad Husin Az-Zihabi

أما الفسخ فحقيقته نقص العد في الحال⁴³

Artinya:

“*Fasakh* adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.”

- c. Menurut Sayyid Sabiq

فسخ العقد: نقضه, وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين⁴⁴

Artinya:

“*Memfasakh* adalah membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara kami suami istri”

⁴¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996) cet. Ke – 1, hlm, 92.

⁴² Ahmad Ghundur, *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Wa'al-Qonun* (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967), cet. Ke – 1, hlm, 236.

⁴³ M.Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968) cet. Kel 2, hlm, 236.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), jilid 2, hlm, 268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Asy-Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*) adalah semua pemutusan ikatan sumai istri yang tidak disertai dengan thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.⁴⁵ Menurut Ensiklopedi Islam *fasakh* ialah putusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau istri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami istri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.⁴⁶ Menurut seksyen 54 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002, *fasakh* diartikan sebagai pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal keadaan yang diharuskan oleh Hukum Syara' mengikut seksyen 54.

Fuqaha' dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai thalaq dengan cerai *fasakh*. Mereka berkata: semua penceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka penceraian dinamakan thalaq, dan semua penceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan *fasakh*.⁴⁷

Nikah *fasakh* merupakan nikah yang terdapat kerusakan di dalam pernikahan yang diperbolehkan untuk dirusak atau diputus pernikahan. Pada hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlansung. Seperti terjadinya penipuan dalam pernikahan, misal istri sebelum menikah menyatakan bahwa dia masih perawan, tetapi ternyata setelah terjadi pernikahan baru disedari oleh suami bahwa istri bukan perawan, atau suatu penyakit yang diderita oleh salah satu pihak tapi

45 Muhammad Ibn Idris al-Syafi'I, *al-Umm*, Juz 3, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 481.

46 Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Arda Utama, 1992), hlm, 282.

47 Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm, 195-196.

ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan baru diketahui setelah pernikahan berlangsung, dan pihak lain merasa tertipu akibat kebohongan tersebut,

2. Dasar Hukum *Fasakh*

Adapun dasar hukum *fasakh* nikah yaitu: hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri.

Firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 231 menyatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁸

⁴⁸ Al-Qu'ran dan terjemahan, *Depertemen Agama RI*, Bandung: CV Diponegoro, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan. Dalam hadits dinyatakan bahwa:

عن أبي سعيد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار (حديث حسن رواه بن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلًا، عن عمر بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا)

Artinya: “*Abu Sa’id, Sa’id bin Sinan al-Khudri ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Tidak rugi dan tidak merugikan.” (Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni dan yang lain. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya al-Muwaththa’ sebagai hadits mursal, dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi saw. dengan meniadakan Abu Sa’id. Hadits ini mempunyai beberapa jalur yang saling menguatkan)*”⁴⁹

Berdasarkan firman Allah SWT dan hadits tersebut para fuqaha’ menetapkan bahwa, jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil tindakan untuk memutuskan pernikahan kemudian hakim menfasakh pernikahan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah SWT memerintahkan kepada kaum lelaki apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, sedangkan ia berhak rujuk, hendaklah ia memperlakukannya dengan baik. Apabila iddahnya hampir habis dan tinggal hanya sisa waktu yang memungkinkan bagi dia untuk rujuk, maka

⁴⁹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto*, (Beirut Dar Al-Fikir, 1989), cet Ke-1, hlm, 489.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adakalanya memegangnya (yakni merujukinya kembali ke dalam ikatannya) dengan cara yang makruf. Hendaklah ia memakai saksi dalam rujukan itu serta berniat mempergaulinya dengan cara yang makruf. Atau adakalanya ia melepaskannya, yakni membiarkannya hingga habis masa iddahnya serta mengeluarkannya dari rumah dengan cara yang lebih baik, tanpa perkecekan dan tanpa pertengkaran, tanpa saling mencaci.⁵⁰

3. Pembagian *Fasakh*

Fasakh dibagi menjadi dua bagian pertama, pembubaran yang berlaku secara serta-merta tanpa memerlukan campur tangan hakim dan yang kedua, pembubaran yang melalui keputusan hakim.⁵¹

Fasakh yang tidak memerlukan kuasa hakim adalah di dalam kasus yang jelas faktornya tanpa memerlukan adanya penyelidikan atau pengadilan di mahkamah seperti perkawinan dengan saudara susuan, perkawinan sesama adik beradik, salah seorang murtad dan lain-lain. Sebagai satu contoh, di dalam *Radd al-Muhtar*, Ibn ‘Abidin bahwa seandainya salah seorang menjadi murtad sedangkan seorang lagi adalah muslim maka pernikahan mereka adalah ter*fasakh* secara serta merta. Ia tidak mengurangkan bilangan thalaq dan tidak memerlukan campur tangan hakim untuk membuat keputusan terhadap perkara tersebut.⁵²

Fasakh yang memerlukan keputusan hakim adalah di dalam kasus-kasus tertentu yang tidak begitu jelas dan boleh dinafikan oleh pihak yang

⁵⁰ Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Lebanon, 2012) Jilid 1, hlm,93-94

⁵¹ Ali Hasb Allah, *al-Furqah Bain al-Zawjayn*, (Kaherah: Dar al-Ahad al-Jalid, 1968), hlm, 1

⁵² *Ibid*, hlm, 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau dikatakan terlibat dengan alasan tersebut.⁵³ Contohnya, seorang istri mendakwa suaminya gagal menyempurnakan nafkah, pihak suami mempunyai hak untuk menafikan atau mempersalahkan tuduhan tersebut. Atas dasar itulah maka ia perlu di sisi para fuqaha seperti al-Syirbini dari madzhab Syafi'i, al-Dusuqi dari madzhab Maliki, dan Ibn Qudamah dari madzhab Hanbali, semuanya berpendapat bahwa dakwaan istri hendaklah diputuskan oleh pihak hakim setelah istri membawa pengaduannya ke mahkamah. Dalam kasus ini hakim adalah pemutus setelah diselidik perkaranya. Saat ini, *fasakh* tidak akan berlaku serta merta kecuali setelah campur tangan hakim. Contoh-contoh lain adalah seperti suami tidak bernaftsu, istri dianiayah secara fisik, suami *ghaib* tanpa menafkahi dan sebagainya.

Di dalam kajian ini, penulis hanya akan mengkhususkan pembahasan kepada tuntutan *fasakh* jenis kedua yaitu yang memerlukan campur tangan hakim sebelum ia dijatuhkan di antara sepasang suami istri. Pembuburan secara otomatis atau *fasakh* jenis pertama tidak akan disentuh di dalam kajian ini kerana ia tidak termasuk dalam pembahasan kajian penulis.

4. Beberapa Alasan yang Mengharuskan *Fasakh*

a. Tidak Mendapat Nafkah

Menurut hasil karya Mat Saad Abdurahman, seorang istri tidak mendapat nafkah zahir dari suaminya selama tiga hari berturut-turut diharuskan menuntut *fasakh* perkawinannya pada hari keempatnya, ada

⁵³ *Ibid*, hlm, 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak keberadaan suami disisnya.⁵⁴ Dalam hal ini *fasakh* hendaklah dilaksanakan oleh hakim atas permintaan istri apabila dapat dibuktikan ketidakmampuan suaminya selama tempoh tersebut. Sehubungan dengan perkara ini, kesepakatan ulama berpendapat *fasakh* disebabkan kegagalan suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya adalah sesuatu yang harus bersamaan dalam beberapa sebab, antaranya firman Allah pada ayat di dalam surah al-Baqarah 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵⁵

⁵⁴ Mat Saad Abdurahman, *Keperluan Manual Undang-undang Keluarga*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm, 230.

⁵⁵ Al-Qu'ran dan terjemahan, *Depertemen Agama RI*, Bandung: CV Diponegoro, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menahan kebebasan seseorang wanita (istri) tanpa memberikannya nafkah merupakan suatu tindakan zalim yang bisa memudaratkan. Bagaimanapun, fuqaha mazhab Hanafi tidak mengharuskan *fasakh* disebabkan ketidakmampuan pemberian nafkah tidak dikira suami seorang yang miskin ataupun kaya.⁵⁶

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Melaka), di dalam pasal 53(a) pula telah memperuntukkan masa selama setahun bagi membenarkan istri menuntut *fasakh* disebabkan kegagalan pihak suami memberikan nafkah batin dan bukannya empat bulan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh ulama fikih.

b. Cacat

Fuqaha menafsirkan cacat ini sebagaimana dalam bentuk cacat alat kelamin suami yang menyekat daripada bersetubuh misalnya zakar terputus (*al-Jubb*), lemah untuk melakukan persetubuhan kerana kecil (*al-Unnah*), zakar menjadi sakit apabila bersetubuh, disebabkan sudah tua atau sumai khunsa yang sempurna.⁵⁷ Bagi pihak istri pula, kecacatan kelaminnya ditafsirkan sebagai faraj yang tersumbat sejak asal, terdapat sekatan misalnya ketumbuhan tulang atau daging (*al-Quran*), terdapat lender yang menyekat persetubuhan, bau busuk yang keluar ketika bersetubuh, bergabungnya qubur dan dubur atau bergabungnya laluna kencing dan mani (*al-Ifda*).⁵⁸

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm, 246.

⁵⁷ Fidaferi, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Kerana Ketidaksempurnaan Suami Menunda Kewajibannya*, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889), hlm, 28.

⁵⁸ *Ibid*, hlm, 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecacatan bisa *menfasakhkan* nikah terbagi dua yaitu cacat yang bisa menghalangi dari melakukan persetubuhan. Seterusnya, cacat yang tidak menghalangi melakukan persetubuhan tetapi tidak terdapat penyakit menjijikkan atau bahaya yang menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat hidup bersama kecuali terpaksa menanggung kesusahan seperti *kusta*, *sopak*, dan gila.

Adapun syarat sah *fasakh* pada mazhab Syafi'i yaitu dua perkara, hakim yang *menfasakh* nikah, yang berarti bahwa tidak sah *fasakh* nikah dengan persetujuan atau kerelaan suami istri itu saja. Perkara yang keduanya yaitu menjatuhkan keterangan atau bukti dengan dua orang saksi atau iqrar atau cara berganti-ganti sumpah.

c. Penyakit

Fuqaha telah menyusun beberapa macam penyakit yang memperbolehkan istri menuntut *fasakh*. Penyakit-penyakit tersebut bersifat bahaya, bisa terajngkit dan dipandang jelek misalnya gila, kusta, balar, tidak terkontrolnya dalam pembuangan air kecil dan besar, buasir dan dubur bernanah.⁵⁹

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab al-Umm "penyakit sopak dan kusta bisa menjangkiti pasangan. Hampir tidak ada seorang pun yang merasa nyaman untuk berhubungan dengan pasangan yang menghidap penyakit itu."⁶⁰

⁵⁹ Ibid, hlm, 30.

⁶⁰ Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugha & Ali asy-Syarbaji, *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), hlm, 795.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Hanafi berpendapat tentang kaharusan *fasakh* adalah hanya milik istri saja kerana seorang suami dapat menegakkan kemudharatan yang menimpa dirinya melalui thalaq, tetapi istri tidak memiliki hak ini. Fuqaha mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *fasakh* menjadi hak bagi kedua pasangan suami istri kerana setiap mereka menerima mudharat akibat daripada berlakunya uyub (cacat dan penyakit).⁶¹

Dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Melaka), ada tiga macam penyakit yang membolehkan berlakunya penceraian perkawinan yaitu gila selama tempoh dua tahun, sedang menghidap penyakit kusta, *vitilago*, atau sedang menghidap penyakit kelamin dalam keadaan bisa terjangkit.

d. Suami Menghilangkan Diri

Jika suami mengasingkan diri tanpa diketahui tempat tinggalnya atau tidak bisa menghadirkan dirinya apabila diperintahkan oleh hakim, yang keadaan ini berlaku dalam waktu setahun atau lebih dan keadaan ini mengakibatkan istri mengganggu mudharat atau istri takut dalam melakukan zina maka menurut fuqaha mazhab Maliki istri harus menuntut *fasakh* daripada pihak hakim yang sekiranya suaminya meninggalkan nakfkah untuknya atau tidak. Fuqaha mazhab Hambali bersetuju dengan pendapat mazhab Maliki. Pendapat mereka ini berdasarkan ijtihad Umar.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm, 241.

⁶² *Ibid*, hlm, 236.

5. Akibat *Fasakh*

Mazhab Hanafi dan Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat kedua-duanya. Mereka berpendapat bahwa perkawinan tidak harus dibubarkan hanya berdasarkan dengan ketiadaan suami lama atau sebentar kerana hak sering melakukan persetubuhan itu adalah milik suami. Manakalah hak wanita dalam persetubuhan hanya sekali saja.⁶³

Penceraian yang diakibatkan *fasakh* tidak mengurangi bilangan thalaq sebab *fasakh* bukan dari thalaq. Jadi yang telah bercerai itu kemudian kembali melalui pernikahan baru setelah menyedari dan rela dengan keadaan seperti apa adanya, thalaq yang dia miliki masih utuh.⁶⁴

Jika *fasakh* itu terjadi sebelum hubungan suami istri, maka tidak ada mahar bagi istri. Apakah *fasakh* itu dari pihak suami ataupun pihak istri, sebab jika *fasakh* itu dari pihak istri maka haknya gugur dan jika *fasakh* itu datang dari pihak suami dan hal itu di sebabkan cacat yang disembunyikan oleh istri terhadap suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan mahar.⁶⁵ Namun jika pemisahan dilakukan sesudah terjadi hubungan suami istri maka ia berhak mendapatkan mahar dan *fasakh* yang dilakukan oleh hakim (pengadilan).

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Slamet Abidin Aminuddin, *Loc-Cit*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm, 82.

⁶⁵ <http://makmun-anshory.blogspot.com/2009/06/khulu-dan-fasakh-dalam-hukum-islam.html> (diakses, 25-03-2017) WIB 08.00.

Mafqud

1. Definisi Mafqud

Menurut bahasa, kata *mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata *mafqud* merupakan bentuk isim maf'ul dari kata faqida yafqadu yang artinya hilang.⁶⁶ Kalimat “faqada” terdapat dalam al-Quran surat Yusuf ayat 76:⁶⁷

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ
كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

Artinya: Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui.⁶⁸

Makanya, kata *mafqud* secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Adapun pengertian *mafqud* menurut istilah, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh para ulama yaitu :

⁶⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997) hlm, 321.

⁶⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2009), hlm, 225.

⁶⁸ Al-Qu'ran dan terjemahan, *Depertemen Agama RI*, Bandung: CV Diponegoro, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Umar al-Khattab, arti *mafqud* adalah orang yang pergi dari rumah tanpa kabar berita, tidak diketahui bagaimana keadaannya, apakah dia masih hidup ataupun sudah mati.⁶⁹

Sedangkan, menurut Yusuf Ata Muhammad Hilwa, arti *mafqud* dari segi istilah ialah apa yang disebut oleh Ibnu Muadud yaitu orang yang telah hilang dari ahli keluarganya dan negaranya, ataupun menjadi tawanan kemudian tidak diketahui tempatnya dan situasinya baik dia masih hidup atau mati dan ianya berterusan untuk suatu tempoh.⁷⁰

Kalangan Hanafiyah mengatakan, bahwa *mafqud* adalah orang yang tidak diketahui antara hidup dan matinya. Sedangkan menurut Mahmud Syaltud, *mafqud* ialah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati.⁷¹

Sementara dalam kalangan Malikiyyah, *mafqud* adalah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang itu.⁷²

Adapun menurut hukum positif di Malaysia yaitu Undang-undang Sipil yang melibatkan hukum publik, arti *mafqud* dianggap sebagai anggapan mati. Secara asasnya kedudukan mafqud diperuntukkan di

⁶⁹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Umar Bin Khathab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999), hlm. 361.

⁷⁰ www.muis.org.my.

⁷¹ Mahmud Syalthud dan Ali As-Syais, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Cet VII, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 246.

⁷² Abu Bakar bin Hasan Al- Kasnawi, Ashal Al-Madarik, juz 1, (Beirut : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, t.th), hlm, 407.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bawah seksyen 108 Akta Keterangan 1950 (Akta 56). Seksyen 108 Akta 56 memperuntukkan yang berikut :

Apabila soalnya ialah baik seseorang itu masih hidup atau telah mati, dan dibuktikan bahwa tiada apa-apa kabar telah didengar mengenainya selama tujuh tahun oleh orang yang sepatutnya mendengar kabar mengenainya jika dia masih hidup, beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya.⁷³

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mafqud* yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Atau pun penyebab hilangnya *mafqud* disebabkan beberapa faktor baik dalam keadaan yang memungkinkan ia selamat seperti berpergian untuk berniaga, menunaikan ibadah haji atau memungkinkan ia tidak selamat seperti, adanya konflik dan peperangan di medan perang, ditangkap oleh musuh pada saat terjadinya perang, jatuh pesawat dan lainnya. Faktor tersebut sangat memungkinkan akan terjadinya kehilangan seseorang.

2. Dasar Hukum *Mafqud*

Adapun dasar hukum yang terkait dengan *mafqud* adalah dasar hukum Islam dan juga hukum positif di Malaysia. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai batas waktu dalam penetapan mengenai batas waktu

⁷³ Mohamed Hadi bin Abd Hamid, *Anggapan Kematian Al-Mafqud menurut Undang-Undang Sivil dan Syariah: Satu Penilaian Semasa*, (Divisyen Shariah, Etiqa Takaful Berhad, Kuala Lumpur, 2014), hlm, 29.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau dalam penetapan batas kematian *mafqud*. Sebagaimana yang telah diriwayatkan Imam Malik berkata: “Siapa pun wanita yang suaminya *mafqud*, maka ia harus menunggu selama empat tahun. Kemudian menjalani ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan selanjutnya halal baginya untuk menikah dengan laki-laki lain”.⁷⁴

Dalam hal ini Imam Malik berpendapat, bagi wanita yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui di mana keberadaan suaminya maka ia harus menunggu selama empat tahun dan kemudian menjalani ‘iddah sebagaimana ‘iddah wanita yang kematian suami selama empat bulan sepuluh hari. Menurutnya lagi, tiada salah bagi seorang istri untuk menikah lagi sesudah habis ‘iddahnya. Pendapat ini adalah bersumberkan pada pendapat Umar bin al-Khaththab.⁷⁵

Adapun dalam riwayat Imam Baihaqi, Imam Syafi’i mengatakan : “telah berkata kepada Ali Bin Abi Taalib R.A terhadap wanita yang hilang suaminya, wanita yang telah ditimpa ujian (suami hilang) itu hendaklah ianya menahan dirinya jangan berkawin sampai masa yakin terhadap kematian suaminya.”⁷⁶

Ini karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

⁷⁴ Malik R.A., *Muwaththa’ Al-Imam Malik R.A.*, (terj. Kh. Adib Bisri Musthofa), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), hlm. 100.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 100.

⁷⁶ Mohd Muslim bin Salleh, Siti Mashitoh Binti Mahamood, *Konsep Hukum dan Perundangan serta Model Penyelesaian Bagi Kes Al-Mafqud Dalam Pentadbiran Harta Pusaka*, (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya) hlm. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁷⁷

Selanjutnya dasar hukum yang digunakan oleh hukum positif di Malaysia adalah di dalam kasus In Re Application of Tay Soon Pang; Ex P5, Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman Mohd Zawawi Salleh telah menegaskan berdasarkan seksyen 108 Akta Keterangan 1950 (Akta 56) menjelaskan secara ringkasnya bahwa enakmen menetapkan waris atau rakan (orang yang seharusnya mendengar perkabaran mengenainya jika ianya masih hidup) memerlukan tempoh tujuh tahun untuk membentuk anggapan bahwa *mafqud* telah mati. Sekiranya tempoh tujuh tahun sudah berlalu, maka *mafqud* boleh dianggap mati setelah permohonan anggapan kematian disahkan oleh mahkamah dan beban untuk membuktikan *mafqud* masih hidup berpindah kepada orang yang ingin menegaskan fakta *mafqud* masih hidup.⁷⁸

⁷⁷ Al-Qu'ran dan terjemahan, *Depertemen Agama RI*, Bandung: CV Diponegoro, 2010)

⁷⁸ Mohamed Hadi bin Abd Hamid, *Anggapan Kematian Al-Mafqud menurut Undang-Undang Sivil dan Syariah: Satu Penilaian Semasa*,..hlm.29.

Jenis-Jenis Anggapan Mati

Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, *mafqud* terdiri dari satu kategori saja. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang orang yang dinamakan *mafqud*. Menurut pendapat Mazhab Imam Syafi'i dalam qawul jadidnya jenis *mafqud* ialah orang yang tidak diketahui lagi beritanya dan menurut dugaan kuat ia telah meninggal.

Menurut pendapat qawul qadim Syafi'i bahwa tidak ada perbedaan sebab putusnya berita seperti karena mengalami musibah, kecelakaan, tenggelam, jatuh dari kapal dan sebagainya yang serupa dan lainnya.⁷⁹

Dalam mazhab Maliki, *mafqud* dapat dibagikan kepada empat jenis yaitu :

1. Al-*Mafqud* di negara Islam, yaitu mereka yang terdiri dalam kategori ini ialah orang yang hilang ketika situasi wabak penyakit dan lain-lain.
2. Al-*Mafqud* di negara bukan Islam (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh menikah dan harta bendanya tidak boleh dibagi.
3. Al-*Mafqud* ketika peperangan di antara orang Islam dan kafir. Mengenai hal ini, ada empat pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum yang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar Muslimin.

⁷⁹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyiq, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj. Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung : Hasyimi, 2013) hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. Keempat, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni terus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.

4. *Al-Mafqud* ketika peperangan sesama orang Islam. Ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan..⁸⁰

Menurut mazhab Hanbali, *al-mafqud* terdiri atas dua jenis yaitu :

1. Orang yang terputus kabar berita yang secara zahirnya kepergiannya itu adalah selamat seperti musafir bagi tujuan perniagaan, pelancongan, menuntut ilmu dan sebagainya.
2. Orang yang terputus kabar berita secara zahir kepergiannya itu adalah berisiko dan bahaya seperti kelasi kapal yang karam di lautan dan hanya sebagian dari mereka yang selamat dan orang yang hilang di padang pasir yang berbahaya..⁸¹

⁸⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun), Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 515.

⁸¹ Ahmad Tarmizi Mahmud, Shahrul Ridhwan S. Ali, *Jurnal Muamalat: Harta Al-Mafqud. Satu Analisis Menurut Perspektif Syariah dan Undang-undang*, (Jabatan Agama Islam Malaysia, 2013) hlm. 8.

Sementara di Malaysia, jenis *mafqud* terbagi kepada dua, yang pertama adalah apabila hilang atau tidak diketahui sama ada masih hidup atau telah mati. Kedua, apabila suami merantau meninggalkan istrinya dalam jangka masa yang lama. Keadaan-keadaan tersebut dapat membawa kepada kemudharatan istri *mafqud*.

Teori Penetapan Anggapan Mati menurut Mazhab Syafi'i

Dalam menentukan status untuk *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama fikih lebih cenderung melihat dari sudut positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sehingga dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan metode *istishab* yaitu menetapkan hukum yang terjadi sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.

Namun anggapan masih hidup tersebut, tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, ini karena menimbulkan masalah dan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, maka perlu pada suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum untuk *mafqud*.

Ada beberapa teori, konsep serta kaidah-kaidah yang dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i untuk menetapkan status *mafqud* apakah ia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang hilang itu dianggap telah mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama masa kelahirannya meninggal.

Dengan kata lainnya tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu maka perkiraan dengan waktu. Di antara kaidah-kaidah fikih yang digunakan mazhab Syafi'i adalah :

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ⁸²

Artinya : “ Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan.”

الأصل بقاء ما كان على ما كان⁸³

Artinya : “Menurut dasar yang asli memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang ada sekarang.”

Antara kaidah lain yang boleh digunakan dalam masalah mafqūd adalah :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan.”

Kesukaran bagi istri kerana ia merupakan satu perkara yang diakui oleh syarak. Kehilangan suami mampu mengundang pelbagai fitnah kepada istri. Maka menjadi suatu kebaikan untuk memisahkan hubungan pernikahan antara mereka selepas berakhirnya tempo tertentu dan isteri dibenarkan untuk berkahwin dengan lelaki lain.

Sementara pendapat mazhab Syafi'i dalam qawul jadidnya yang menyatakan istri yang suaminya hilang tidak boleh mengajukan *fasakh*, sebab apabila dalam hal pembagian harta warisan kematian suami tidak bisa dipastikan, maka dalam hal kematian suami yang hilang tidak bisa dihukumi mati demi perkawinan istri dengan suami kedua. Pendapat mazhab Syafi'i dalam qawul jadid ini juga menggunakan prinsip istishab yaitu menetapkan

⁸² Mukhtar Yahya, Fachtur Rahman, *Op-Cit*, hlm 497.

⁸³ *Ibid*, hlm, 394.

hukum sesuatu menurut keadaan sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa bagi istri yang suaminya *mafuqad*, wajib dibiarkan tetapnya pernikahan yang sudah diyakininya sampai jelas atau nyata tentang keadaan suaminya yang sebenarnya. Mereka cenderung memandang pada segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup sampai ia dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Istrinya tetap menjadi miliknya walaupun dalam waktu yang lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan melihat kawannya yang sebaya sudah mati semua atau sudah lewat masa orang seperti itu tidak hidup lagi menurut adat.⁸⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penetapan anggapan mati sebagai alasan fasakh nikah menurut seksyen 54 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 yaitu adanya tenggang waktu bagi penetapan tersebut adalah selama empat tahun atau lebih sehingga istri patut berkawin lagi, dengan adanya seksyen (pasal) ini maka terwujudnya kelangsungan hidup bagi seorang istri. Justeru, hak dan kewajiban seorang istri terpelihara yakni dari segi institusi keluarga, nafkah, maruah, dan perwalian terhadap anak perempuan yang ditinggalkan oleh suami yang hilang.
2. Analisa Hukum Islam bahwa seksyen (pasal) 54 mengenai aturan penetapan anggapan mati bagi suami yang hilang sesuai dengan Hukum Kekeluargaan Islam kerana lebih banyak masalah dalam ketetapan ini dari mudharatnya.

B. Saran

1. Umat Islam juga haruslah menghindarkan diri dari pemikiran yang terkadang menimbulkan kontroversial, tidaklah pada tempatnya serta merta dituding sebagai pendapat yang sesat sepanjang didasari pada sebuah argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bagi golongan ilmiah, kajian mengenai Hukum Islam hendaknya jangan hanya terfokus pada bangku kuliah, karena hal tersebut sangat tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukupi. Penulis menyarankan hendaknya dibentuk sebuah kajian atau forum-forum yang bernuansa ekstrakurikuler yang membahas tentang Hukum Islam. Karena hal ini dapat mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan seseorang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam.

3. Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Tentu saja besar harapan penulis, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh pemerhati dunia Islam sehingga pemaknaan kita terhadap wacana permasalahan Hukum Islam ini menjadi lebih sempurna. Mudah-mudahan pemikiran dari kedua kelompok di atas lebih memperkaya khazanah pemikiran Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek metodologi, legaslasi, dan Yurisprudensi*- Artikel
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdul Wahab Khalaf, *Al-Ahwal Syaksiyyah Fi Syariat Islamiyah* (Kuwait: Darul al-Qalm,1990)
- Abi Hasan Ali AL-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, juz 8, (Beirut – Libanon: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah,)
- Abu Bakar bin Hasan Al- Kasnawi, *Ashal Al-Madarik*, juz 1, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah)
- Abul Khairi Al-Latifi, *Fiqh Perkahwinan Menurut Imam Syafi’I*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah,2000)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press,2011)
- Ahmad bin Ibrahim dan Ahilemah binti Jones, *Sistem Undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985)
- Ahmad Ghundur, *At-Talaq Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah*, Wa’al-Qonun (Mesir:Dar Al-Ma’arif,1967)
- Ahmad Tarmizi Mahmud, Shahrul Ridhwan S. Ali, *Jurnal Muamalat: Harta Al-Mafqud: Satu Analisis Menurut Perspektif Syariah dan Undang-undang*, (Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia,2013)
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997)
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996)
- Ali Hasb Allah, *al-Furqah Bain al-Zawjayn*, (Kaherah: Dar al-Ahad al-Jalid, 1968)
- Ali Muhammad Amdi, *Ahkam Fi Usuli Al-Ahkam*, (Bairut, Lubnan: Maktabah Islami 1406 H)
- Al-Quran dan terjemahan, *Depertemen Agama RI*, Bandung: CV Diponegoro, 2010)
- Amir Saifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet.4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Mir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
2. Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* (Mesir : al-fath al-I'Iam, 2004)
3. Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2009)
4. Idafiri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Kerana Ketidaksempurnaan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889)
5. Jusoh, *Pemakaian Undang-undang Islam kini dan Masa Depan nya di Malaysia*, Dalam Ahmad Ibrahim, *Al-Ahkam Undang-undang Masa Kini*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990)
6. Hasan Bahrom, *Perlembagaan Isu Pelaksanaan Undang-undang Islam*, Jurnal Syari'ah Jilid 7, edisi Januari, 1999
7. <http://makmun-anshory.blogspot.com/2009/06/khulu-dan-fasakh-dalam-hukum-islam.html> (diakses, 25-03-2017) WIB 08.00
8. <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/06/sekilas-tentang-mafqud/>
9. <https://fitrahislami.wordpress.com/2017/04/25/hukum-mafqud-orang-hilanganpa-berita/>
10. <https://www.suduthukum.com/2016/08/orang-mafqud-menurut-imam-syafii-qaul.html>
11. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun), Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
12. Ibrahim bin Lembut, *Al-Mafqud: Problematika dan Penyelesaian Harta Orang Hilang menurut Perundangan Syariah di Malaysia*, (UIN Suska Riau, 2013)
13. Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto*, (Beirut Dar Al-Fikir, 1989)
14. Jalal Ad-Din, Assuyuthi, *Al-Asybah wa an-nadair fi Al-Furu'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989)
15. Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Perlembagaan Persekutuan*, (Kuala Lumpur: Berlia, 1996)
16. M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968) cet. Kel 2
17. Mahmood Zuhdi Abd Majid, pengantar Undang-undang Islam di Malaysia, ect II, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2004)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mahmud Syalthud dan Ali As-Syais, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Cet VII, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993)
- Maknum Bin Hj. Md. Sabari, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002*, (Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2002)
- Maknum bin Hj.Md Sabari *Undang-Undang Negeri Melaka* (Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2002)
- Malik R.A., *Muwaththa' Al-Imam Malik R.A.*, (terj. Kh. Adib Bisri Musthofa), (Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1993)
- Mardiana Abdul Rahim, Sejarah Pelaksanaan Undang-undang di Pulau Penang, dalam (Jurnal Syariah jilid 7 edisi Januari, 1999)
- Mariyatul Qibtiyah binti Hj. Mohamad, Noralfishah binti Sulaiman, *Isu Dalam Menguruskan Harta Mafqud di Malaysia*, (Department of Real Estate Management, Faculty of Technology Management and Business, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Mat Saad Abdurahman, *Keperluan Manual Undang-undang Keluarga*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005)
- Mohamad Azam, Quo Vadis Kekuasaan dan Kedudukan Mahkamah Syari'ah di Malaysia Abad ke 20, (Jurnal Syari'ah edisi Juli, 2000, jilid 8)
- Mohamed Hadi bin Abd Hamid, *Anggapan Kematian Al-Mafqud menurut Undang-Undang Sivil dan Syariah: Satu Penilaian Semasa*, (Divisyen Syariah, Etiqa Takaful Berhad, Kuala Lumpur, 2014)
- Mohd Muslim bin Salleh, Siti Mashitoh Binti Mahamood, *Konsep Hukum dan Perundangan serta Model Penyelesaian Bagi Kes Al-Mafqud Dalam Pentadbiran Harta Pusaka*, (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)
- Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Al-Mawarits*, (Beirut: Darul Kutub Alamiah)
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung : Diponegoro, 1992.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensklopedia Umar Bin Khathab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999)www.muis.org.my
- Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugha& Ali asy-Syarbaji, *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1995)
 Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2010)
 Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir: al- Fath al-I'lam, 2004)
 Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999)
 Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
 Sulaiman bin al-Asy'ah Abu Dawud al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr.)
 Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Ugm 1980)
 al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyiq, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj. Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung : Hasyimi, 2013)
 Muhammad Bin Abdullah al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, (Jakarta Selatan : Embun Publishing, cet 1, 2008)
 M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995)
 Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan *Analisis Sekysyen 54 Enakmen Undang – Undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 Mengenai Anggapan Mati Sebagai Alasan Fasakh Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam*, yang ditulis oleh :

Nama : **AMIERAH BINTI YA'AKOB**
NIM : 11521205578
Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

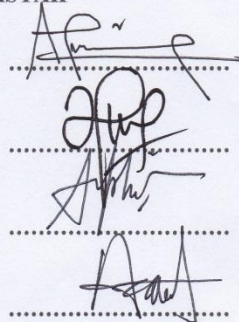
Pekanbaru, 06 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Haswir, M.Ag

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Dr. Arisman, M.Sy



Diketahui
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum



Erni, S.Sos, MM

NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AMIERAH BINTI YA'AKOB**

NIM : **11521205578**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA (AKHWAL ASY-SYAKSIYYAH)**

Judul : **ANALISIS SEKSYEN 54 ENAKMEN UNDANG-UNDANG
KELUARGA ISLAM NEGERI MELAKA TAHUN 2002 MENGENAI
PENETAPAN ANGGAPAN MATI SEBAGAI ALASAN FASAKH
NIKAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

Pembimbing : **Dr. Zulfahmi Bustami, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 November 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama sebenar penulis adalah **Amierah binti Ya'akob**.

Dilahirkan di Hospital Melaka, Malaysia, pada tanggal 22 Juni 1997 dan dilahirkan sebagai anak kedua daripada tiga bersaudara dan menetap di Masjid Tanah, Melaka, Malaysia.

Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Dato' Naning Alor Gajah, Melaka, Malaysia. Kemudian juga melanjutkan peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Dol Said, Alor Gajah, Melaka seterusnya penulis menamatkan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin, Masjid Tanah, Melaka. Dan kemudian melanjutkan lagi pengajian yang lebih tinggi di peringkat Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia, dalam Hukum Keluarga pada tahun 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.